

BAB IV

SIMPULAN

Salah satu bentuk perwujudan *good governance* adalah melaksanakan pengelolaan keuangan negara dalam hal pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam pengelolaan BMN/D terdapat proses penatausahaan atas barang yang digunakan. Penulis telah meninjau atas pelaksanaan penatausahaan BMD yang dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten Batang pada tahun 2021. Berdasarkan data, informasi, dan hasil tinjauan yang telah dilakukan Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan penatausahaan Barang Milik Daerah pada BPKPAD Kabupaten Batang pada tahun 2021 terdiri dari tiga proses meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pada penatausahaan ini BPKPAD Kabupaten Batang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Barang Milik Daerah (BMD). Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan yang mengatur pengelolaan BMD yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017 serta telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD dan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

2. Proses pertama dalam penatausahaan adalah pembukuan. Pengurus Barang melaksanakan pembukuan dengan cara mendaftarkan dan mencatat barang milik daerah yang disesuaikan menurut penggolongan dan kodefikasinya. BPKPAD Kabupaten Batang mengkategorikan BMD berdasarkan golongannya menjadi 6 (enam) golongan meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Untuk kodefikasi lokasi BPKPAD Kabupaten Batang tahun 2021 terdiri atas 14 (empat belas) meliputi kode status kepemilikan, provinsi, kabupaten, bidang, unit bidang, sub unit bidang, dan unit pengguna barang. Kode barang meliputi kode jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, dan sub-sub rincian objek. Pemberian nomor kode barang di BPKPAD Kabupaten Batang terdiri atas 11 (sebelas) digit. Penggolongan dan kodefikasi ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016.
3. Proses kedua adalah inventarisasi dilakukan oleh Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Kepala Subbagian Umum/Kepegawaian dan petugas lain yang ditunjuk. Untuk inventarisasi di BPKPAD Kabupaten Batang diawali dengan menetapkan SK Tim Inventarisasi dan dilakukan secara rutin tiap semester sekali. Kegiatan inventarisasi ini dilakukan untuk mengetahui keadaan/kondisi dari barang yang sebenarnya. Kondisi barang milik daerah sejatinya dibagi menjadi ke dalam 3 (tiga) kondisi yaitu baik, rusak ringan, dan rusak berat. Selanjutnya barang yang sudah diinventarisasi akan dicatat dalam berita acara.

4. Proses terakhir adalah pelaporan yang mana dilakukan dengan merekonsiliasi barang menggunakan aplikasi SIMDA BMD. Proses pelaporan dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten Batang 1 (satu) kali dalam setahun. Pada pelaporan BMD terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang. Hasil laporan yang sudah dilakukan akan dituangkan dalam rekapitulasi mutasi aset tetap berdasarkan penggolongannya.
5. Selama kegiatan penatausahaan BPKPAD Kabupaten Batang mengalami beberapa kendala yaitu:
 - a) Dokumen hibah dari Pemerintah Pusat/Provinsi pada saat penyerahan tidak selalu dilampirkan
 - b) Pengurus barang terkadang memperoleh informasi yang tidak valid
6. Untuk mengatasi kendala yang terjadi saat penatausahaan di BPKPAD Kabupaten Batang maka diterapkanlah kebijakan sebagai berikut:
 - a) Dikarenakan pada saat penyerahan hibah dari Pemerintah Pusat/Provinsi tidak melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan maka pihak pengelola aset di BPKPAD Kabupaten Batang memberi himbauan kepada masing-masing OPD untuk melengkapi dokumen yang kurang agar para PPTK di OPD memberikan data pengadaan belanja modal ke pengurus barang dan menerbitkan SK guna anggaran belanja modal dicairkan.
 - b) Informasi yang tidak valid dapat diminimalisir dengan memilah informasi yang diterima dengan menempatkan SDM sesuai dengan tugasnya sehingga dapat bekerja secara profesional. Dapat dikatakan bahwa adanya

informasi yang valid dan relevan juga dipengaruhi oleh SDM yang berkualitas.